BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan data skunder.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan *Napoleon Bonaparte*, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda

kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan *NICA.*
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti *NICA* bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg)*, saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata

kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

   b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
    a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
    b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
    c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
    d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan kepegawaian,
    b. Melakukan urusan Keuangan,
    c. Melakukan urusan tata usaha,
    d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
    b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
    c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
    d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
    b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
    c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penetapan,
    b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
    b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
   b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
   c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
   d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
   b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
   c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
   d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Analis Tingkat Produktivitas Pemeriksaan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Pada bagian ini akan diuraikan data tentang Tingkat Produktivitas Pemeriksaan di wilayah Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Tingkat Produktivitas Pemeriksaan di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Tingkat Produktivitas Pemeriksaan
Di Wilayah Kota Bandung

Data Variabel	**Tingkat Produktivitas Pemeriksaan**	
Unit Analisis	LPP Tahun 2009	LPP Tahun 2010
KPP Karees	290	266
KPP Cicadas	204	157
KPP Tegallega	232	208
KPP Cibeunying	258	234
KPP Bojonagara	252	232
Total	1236	1097

Apabila dilihat secara umum total laporan pemeriksaan pajak yang diterbitkan di Wilayah Kota Bandung pada tahun 2009 sebanyak 1.236 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 1.097. Dilihat dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya penurunan jumlah laporan pemeriksaan pajak sebanyak 139, berarti ada penurunan produktivitas pemeriksaan di Wilayah Kota Bandung. Seharusnya di tahun 2010 jumlah laporan pemeriksaan pajak harus bisa melebihi jumlah laporan pemeriksaan pajak di tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees LPP yang diterbitkan di tahun 2009 sebanyak 209 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 266. Berarti ada penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang seharusnya di tahun 2010 jumlah LPP bisa melebihi di tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas LPP yang diterbitkan di tahun 2009 sebanyak 204 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 157. Berarti ada penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang seharusnya di tahun 2010 jumlah LPP bisa melebihi di tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega LPP yang diterbitkan di tahun 2009 sebanyak 232 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 208. Berarti ada penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang seharusnya di tahun 2010 jumlah LPP bisa melebihi di tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying LPP yang diterbitkan di tahun 2009 sebanyak 258 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 234. Berarti ada penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang seharusnya di tahun 2010 jumlah LPP bisa melebihi di tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara LPP yang diterbitkan di tahun 2009 sebanyak 252 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 232. Berarti ada penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang seharusnya di tahun 2010 jumlah LPP bisa melebihi di tahun 2009.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di KPP wilayah kota bandung jumlah laporan pemeriksaan (LPP) yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 1.236 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 1.097. Hal ini disebabkan karena adanya satgas dan jumlah pegawai pemeriksa yang sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajaknya. Dari jumlah LPP yang diterbitkan dapat dilihat bahwa Tingkat Produktivitas pemeriksaan pada KPP di wlayah kota bandung mengalami penurunan.

4.2.1.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tentang Tingkat Produktivitas Pemeriksaan di wilayah Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Tingkat Produktivitas Pemeriksaan di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data kepatuhan Wajib Pajak
Di Wilayah Kota Bandung

Data Variabel	**Kepatuhan Wajib Pajak**	
Unit Analisis	SKPKB Tahun 2009	SKPKB Tahun 2010
KPP Karees	261	306
KPP Cicadas	223	461
KPP Tegallega	56	78
KPP Cibenying	389	434
KPP Bojonagara	168	213
Total	1097	1492

Apabila dilihat secara umum total SKPKB yang diterbitkan di Wilayah Kota Bandung pada tahun 2009 sebanyak 1.097 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 1.492. Dilihat dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kenaikan jumlah SKPKB sebanyak 395, berarti ada kenaikan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak di

Wilayah Kota Bandung. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada tahun 2009.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees SKPKB yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 261 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 306. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada 2009. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP karees belum patuh dan melakukan kecurangan atau mereka membayar pajaknya tidak sesuai atau kurang bayar, sehingga diterbitkan SKPKB kepada mereka.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas jumlah SKPKB yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 223 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 461. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada 2009. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP karees belum patuh dan melakukan kecurangan atau mereka membayar pajaknya tidak sesuai atau kurang bayar, sehingga diterbitkan SKPKB kepada mereka.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega jumlah SKPKB yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 56 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 78. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada 2009. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP karees belum patuh dan melakukan kecurangan atau mereka membayar pajaknya tidak sesuai atau kurang bayar, sehingga diterbitkan SKPKB kepada mereka.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying jumlah SKPKB yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 389 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 434. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada 2009. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP karees belum patuh dan melakukan kecurangan atau mereka membayar pajaknya tidak sesuai atau kurang bayar, sehingga diterbitkan SKPKB kepada mereka.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara jumlah SKPKB yang diterbitkan tahun 2009 sebanyak 168 sedangkan di tahun 2010 sebanyak 213. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB harus lebih kecil dibandingkan pada 2009. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP karees belum patuh dan melakukan kecurangan atau mereka membayar pajaknya tidak sesuai atau kurang bayar, sehingga diterbitkan SKPKB kepada mereka.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak di wilayah kota bandung belum semuanya patuh atau membayar tunggakan pajaknya tidak sesuai dengan hutang pajaknya. Seharusnya di tahun 2010 jumlah SKPKB yang diterbitkan lebih kecil dari tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh tidak tahunya wajib pajak dalam menghitung tunggakan pajaknya atau dilakukan secara sengaja.

4.2.2 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.2.2.1 Pengaruh Tingkat Produktivitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Data variabel X (Tingkat Produktivitas Pemeriksaan) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut:

4.2.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Sebelum diuji pengaruh tingkat produktivitas pemeriksaan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regresi. Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.27, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan *software SPSS 14* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.008	.002		3.222	.048
	Tingkat_Produktivitas_ Pemeriksaan	-1.937	.977	-.753	-1.983	.142

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Dari output *software SPSS 14* di atas diperoleh model regresi sebagai berikut :

Y = 0,008 + -1,937 X

Nilai konstanta a memiliki arti bahwa ketika variabel tingkat produktivitas pemeriksaan (X) bernilai nol atau kepatuhan wajib pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh tingkat produktivitas pemeriksaan, maka rata-rata kepatuhan wajb pajak bernilai 0,008. Sedangkan koefisien regresi b memiliki arti bahwa jika variabel tingkat produktivitas pemeriksaan (X) meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar -1,937. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya tingkat produktivitas pemeriksaan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung (semakin baik tingkat produktivitas pemeriksaan, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak).

4.2.2.3 Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat produktivitas pemeriksaan dengan kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, digunakan analisis korelasi Pearson.

Berikut ini adalah hasil pengolahan *software SPSS 14* untuk koefisien korelasi mengenai hubungan antara tingkat produktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Tabel 4.5
Korelasi Antara Data Variabel Tingkat Produktivitas Pemeriksaan (X) danVariab

Correlations

		Kepatuhan_ Wajib_Pajak	Tingkat_ Produktivitas_ Pemeriksaan
Pearson Correlation	Kepatuhan_Wajib_Pajak	1.000	-.753
	Tingkat_Produktivitas_ Pemeriksaan	-.753	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan_Wajib_Pajak	.	.071
	Tingkat_Produktivitas_ Pemeriksaan	.071	.
N	Kepatuhan_Wajib_Pajak	5	5
	Tingkat_Produktivitas_ Pemeriksaan	5	5

el Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,753, yang berarti terdapat hubungan yang cukup tinggi antara variabel tingkat produktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Artinya, semakin tinggi/baik tingkat produktivitas pemeriksaan, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

4.2.2.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS 14 *for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.6
Analisis Korelasi Pearson

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753[a]	.567	.423	.00108169

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Produktivitas_ Pemeriksaan

Koefisien determinasi dari hasil perhitungan didapat sebesar 56,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas pemeriksaan memberikan pengaruh sebesar 56,7% artinya (sangat berpengaruh) terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 43,3% kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti seperti sistem tehnologi informasi, pelayanan, kesadaran, pemahaman dan *self assessment system*.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yaitu sebesar -0,753. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, tapi pemeriksaan pajak adalah faktor terkuat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan karena pengaruh yang diberikan oleh pemeriksaan pajak lebih dari 50% yaitu 56,7% sehingga pemeriksaan pajak merupakan faktor utama bila dibandingkan dengan faktor lain.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 14.0 For Windows*, hasilnya adalah tingkat produktivitas pemeriksaan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan teori yang menyatakan bahwa:

> "Peningkatan produktivitas pemeriksaan saja tidak efektif. Akan efektif apabila produktivitas pemeriksaan dikombinasikan dengan probabilitas pemeriksaan yang lebih tinggi bahwa dampak keseluruhan pada kepatuhan adalah positif."

Dapat disimpulkan harapan dari tingkat produktivitas pemeriksaan yang semakin baik sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau semakin baik, sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara efektif.

4.2.2.5 Uji Hipotesis

$H_0 : \beta = 0$ Artinya, berpengaruh secara tidak signifikan tingkat produktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

$H_a : \beta \neq 0$ Artinya, terdapat pengaruh tingkat produktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

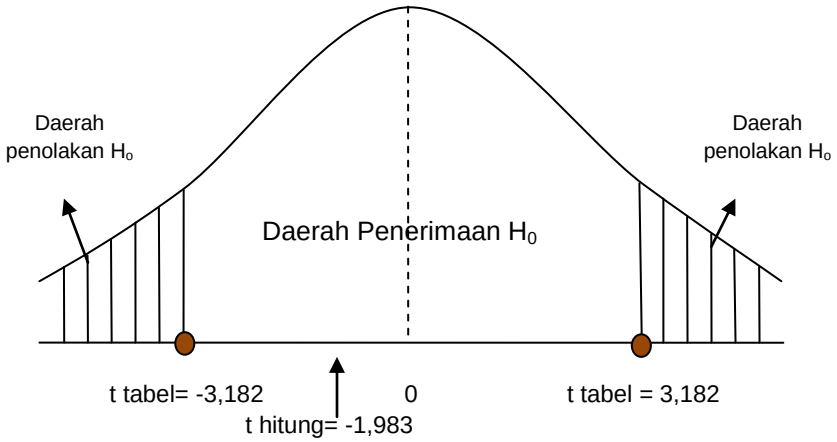
Rumus yang digunakan dalam menguji hipotesis diatas menggunakan yaitu menggunakan uji t student :

Dengan $\alpha = 5\%$ dan dk = n-2 = 3 diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm$ 3,182.

Berdasarkan kriteria uji berikut:

1. Terima Ho jika -t tabel < t hitung < t tabel
2. Tolak Ho jika t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel

Gambar 4.1
Kurva Uji T



Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diperoleh nilai t hitung sebesar -1,983. Karena nilai t hitung (-1,983) < t tabel (-3,182), maka Ho ditolak. Artinya, terdapat pengaruh tingkat produktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.